

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers. Jakarta.

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

A. Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ubhara Press. Surabaya.

Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Amiruddin., & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

Bambang Waluyo. 2020. *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Semarang.

Bettina Yahya (et.al.). 2017. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

- Boy Nurdin. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.
- Chaerul Amir. 2014. *Kejaksaan Memberantas Korupsi: Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Deleader. Jakarta Pusat.
- Diky Anandya (et.al.). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*. Indonesian Corruption Watch. Jakarta.
- Hengki Mangining Parulian Simarmata (et.al). 2020. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Elwi Danil. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Extrix Mangkepriyanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia. Jawa Barat.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Laode M. Syarif (et.al.). 2015. *Hukum Anti Korupsi*. The Asia Foundation. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.

- Marjan Miharja. 2020. *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Yusni. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Mukti Fajar., & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- O.C. Kaligis & Associates. 2006. *"Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi"*. O.C. Kaligis & Associates. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalli. 2019. *Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Safitri Wikang Nawang Sari. 2020. *Hukum Pidana Dasar*. Lakeisha. Jawa Tengah.
- Said Sampara (et.al.). 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print. Makassar.
- Syahroni (et.al.). 2018. *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Deepublish. Yogyakarta.

- Syahruddin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha. Makassar.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Widyo Pramono. 2016. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia*. Refika Aditama. Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zainal Abidin & A. Gimmy Prathama Siswadi. 2015. *Psikologi Hukum: Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi, Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

## **Jurnal**

- Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi., & Hartiwiningsih. *Paradigma dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia*. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII Nomor 1 Januari-Juni 2019.
- Andrew Shandy Utma. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksiklopedia Social Review*. Vol. 1, Nomor 3 Oktober 2019.

- Benedict Jaya. Marwan Mas & Abd. Haris Hamid. Analisis Hukum Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 11/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mamuju). *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol.4, No.1 Desember 2021.
- Carto Nuryanto. Penegakan Hukum Oleh Hakim dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol.3 Nomor 1 Maret 2018.
- Fakhrudin Odhy. Perspektif Budaya Hukum dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. Vol.1, No.1 Maret 2021.
- Febry Satya Wibawa Hussein. Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011). *Khazanah: Jurnal Edukasi*. Vol.2, No. 1 Maret 2020.
- Hanindya Seno Saskara, Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, *Jurist-Diction*, Vol. 3. Nomor 5 September 2020.
- I Wayan Jimmy Artana (et.al). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS Anak/2017/PN.AMP). *Jurnal Anologi Hukum*. Vol.1, No. 2 Mei 2019.

- Marten Bunga (et.al). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*. Vol. 15, No.1 September 2019.
- Nani Widya Sari. Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 4, No. 2 Desember 2017.
- Nur Fitriyani Siregar. Efektivitas Hukum. *Al-Razi*. Vol. 18, No. 2 Desember 2018.
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap. Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 3 Nomor 2 Desember 2018.
- Rosalia Dika Agustanti. Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. *Jurnal Yuridis*. Vol.7, No. 1 Juni 2020.
- Sandro Unas. Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Et Societatis*. Vol. VII, No. 4 April 2019.
- Sigit Herman Binaji & Hartanti. Korupsi Sebagai Extraordinary Crimes. *Jurnal Kajian Hukum*. Vol.4, No. 1 Mei 2019.

Velycia Maya Yuwanta. Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, Vol. 2, Nomor 4 Juli 2019.

Warih Anjari. Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Widya Yustisia*. Vol. 1 Nomor 2 Desember 2017.

Wawan Heru Suyatmiko. Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol.7, No.1 Juni 2021.

Wicipto Setiadi. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Hambatan, Solusi, dan Regulasi. *Jurnal Legislasi*. Vol.15, No. 3 September 2018.

Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 48, No. 2 Desember 2018.

Wisnu Gita Prapanca. Penegakan Hukum Terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol.10, Nomor 01 Juni 2019.

### **Skripsi**

Azharul Nugraha Putra Paturusi. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/PI.d.Sus.TPK/2015/PN.Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sarifudin Difinubun. 2020. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam. Ambon.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode  
Perilaku Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.